

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan apa yang disebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari”. Perampokan, pemerkosaan,

penipuan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan.

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 81.

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”

“Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut.

---

<sup>3</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 23

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222

Aspek Kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana.<sup>5</sup>

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problem manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.<sup>6</sup>

Dewasa ini, pemerkosaan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang selalu di gaungkan oleh aktivis anak dan perempuan. Pasalnya sejak tahun 2016 Indonesia sudah memasuki masa darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Termasuk didalamnya adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan paksaan untuk menjual diri sering terjadi dan melibatkan anak sebagai pelaku utama. Kekerasan seksual seperti perkosaan yang terjadi pada anak bisa terjadi dan dilakukan oleh siapapun, dapat dilakukan oleh orang dewasa anak-anak bahkan dapat dilakukan oleh orang tidak dikenal. Beberapa kasus bahkan sering terjadi di sekitar kita pemerkosaan terhadap anak dilakukan oleh oknum keluarga sendiri.

Sehingga perlindungan terhadap anak harus menjadi hal yang prioritas yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia sudah mengkategorikan kejahatan seksual sebagai kejahatan yang luar biasa dan di butuhkan penanganan dan perhatian yang luar biasa pula dalam menangani kejahatan

---

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, 2011, hlm. 3

<sup>6</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47

seksual terhadap anak.<sup>7</sup> Keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan penegak hukum yang berkeadilan terhadap fenomena kejahatan seksual yang semakin hari semakin memprihatinkan, hal tersebut ditunjukkan melalui keseriusan pemerintah dalam pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Presiden melalui penetapan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, terkhusus bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.

Tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan pemerkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>8</sup>

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang

---

<sup>7</sup> Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.106

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>9</sup>

Secara normative pemerintah sudah berupaya untuk memberikan payung hukum pemidanaan bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual. Namun tidak semua kasus dapat dilakukan penuntutan di muka Pengadilan karena dilandasi oleh beberapa alasan hilangnya kewenangan penuntutan oleh jaksa

---

<sup>9</sup> Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yaitu (1) seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan keberlakuan asas *Nebis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluwarsa penuntutan pidana, penyelesaian di luar pengadilan, amnesti dan abolisi. Dari beberapa alasan hapusnya kewenangan penuntutan oleh kejaksaan atau badan lain yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang, yang menarik adalah ikhwal daluwarsa tindak pidana yang memiliki berbagai aturan baik masa daluwarsa yang variatif dan penentuan daluwarsa lain yang di tentukan pada pidana anak. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 78 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*
  1. *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
  2. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
  3. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
  4. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;*
2. *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.106

Adapun contoh kasus yang penulis ambil dalam tindak pidana pemerkosaan yang daluwarsa yaitu uraiannya sebagai berikut: Pada kelas XI SMA, NAT berpacaran dengan seorang teman sekolahnya yang bernama BDS pada awalnya mereka berpacaran normal-normal saja dan masih dalam batas wajar, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2009 BDS mulai berani membujuk NAT untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat itu NAT sempat beberapa kali menolak tetapi BDS tetap berusaha membujuk NAT dengan mengancam akan memutus cintanya apabila NAT tidak menerima ajakan BDS. Akhirnya terpaksa NAT melayani hasrat seksual BDS, akibat kejadian tersebut sekitar bulan Januari 2010 NAT baru menyadari bahwa terakhir menstruasi pada bulan Oktober 2009, kemudian NAT bersama kedua orang tuanya periksa ke dokter umum dan dokter menyarankan untuk melakukan USG ternyata hasil USG menyebutkan bahwa NAT telah mengandung janin yang berusia 12 minggu. Selanjutnya orang tua NAT mendatangi rumah BDS untuk menuntut tanggung jawab atas kehamilan NAT. Namun ayah BDS menyatakan merasa keberatan dengan solusi pernikahan sambil menanyakan nomor rekening bank orang tua NAT tanpa menyebutkan maksudnya. Beberapa hari kemudian ditransferkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ternyata uang tersebut untuk biaya melakukan aborsi terhadap janin yang ada dalam kandungan NAT. Sejak awal NAT dan kedua orang tuanya tidak berniat untuk melakukan aborsi, maka orang tua NAT meminta nomor rekening bank orang tua BDS untuk pengembalian uang tersebut yang mana tidak pernah dijawab. BDS sempat berjanji kelak bila BDS sudah bekerja akan bertanggungjawab tentang anak tersebut, yang pada



saat itu BDS akan belajar di Luar Negeri (Australia), dan sejak saat itu pula BDS bersama keluarganya sudah tidak memperdulikan bayi yang sedang dikandung oleh NAT hasil dari perbuatannya dengan BDS. Pada tanggal 21 Juli 2010 telah lahir bayi perempuan hasil hubungan antara BDS dan NAT, yang bernama VT. Yang mana nama “V” tersebut diberikan atas permintaan BDS yang pada saat itu masih aktif berkomunikasi melalui yahoo messengers. Selanjutnya setelah BDS selesai belajar di luar negeri dan hendak kembali ke Indonesia semua yang diomongkannya hanyalah janji kosong, dan hati NAT semakin hancur dan merasa dikhianati oleh BDS setelah NAT mendengar kabar bahwa BDS dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. NAT dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminta pertanggungjawaban dari BDS dan keluarganya terhadap nasib VT yang sejak dalam kandungan sudah ditelantarkan. Akibat dari perbuatan BDS tersebut, saat ini NAT bersama keluarganya menanggung sendiri semua kebutuhan VT termasuk biaya-biaya sekolah dan NAT dengan sedang terombang ambing dengan status yang tidak jelas karena hanya menunggu pertanggungjawaban dari BDS. Pada tanggal 22 februari 2018, NAT memohon tindak lanjut pengaduan dan perlindungan hukum kepada Bapak Kepolisian Resort Kota Malang di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan dan penelantaran anak yang dilakukan oleh Sdr. BDS, yang mana perkembangan terakhir yang dilakukan oleh pihak POLRESTA KOTA MALANG terhadap penanganan kasus tersebut menurut info yaitu telah mengundang Sdr. BDS untuk diminta keterangan. Namun, hingga saat ini, belum pernah menerima informasi tindak lanjut dari

penanganan kasus tersebut, dikarenakan gugurnya hak penuntutan hukuman (*strafsactie*) karena lewat waktunya.

Dari permasalahan diatas, dapat disadari bahwa tenggang waktu yang khusus bagi anak sebagai pelaku kejahatan yang bernilai antinomi dengan antara ketentuan pasal 78 ayat 1 KUHP dengan Pasal 78 ayat 2 KUHP. Peraturan tersebut kemudian hari menyebabkan hilangnya hak bagi korban untuk melakukan penuntutan, atau mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban, baik itu dengan penyelesaian secara diversi dengan keluarga ataupun dihadapan Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DALUWARSA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana rekonstruksi masa daluwarsa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan;
2. Untuk mengetahui rekonstruksi masa daluwarsa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para ahli hukum maupun para mahasiswa hukum terkait dengan ketentuan daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat dalam memperoleh informasi terkait masa daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan ;
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu tulisan tersebut nantinya dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan tinjauan yuridis ketentuan daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, diharapkan

juga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktis maupun teoritis hukum serta masyarakat pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode dari penulisan hukum akan mempengaruhi perolehan sumber data dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah dan demi terciptanya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian hukum yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin, maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang – undangan serta literature – literature bacaan yang berhubungan dengan penulisan ini.

### **2. Jenis dan Bahan Hukum**

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Berupa bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literature yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan dokumen, konsep rancangan undang-undang khususnya konsep rancangan undang-undang KUHP.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu data yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap data primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penulisan ini yang digunakan adalah model studi kepustakaan (Library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative, yaitu penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti buku-buku pustaka, majalah artikel, surat kabar, buletin, tentang segala hal yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

#### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisa data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara beruntun mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

##### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana di bawah umur, masa daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan di uraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yakni bagaimana ketentuan daluwarsa tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana rekonstruksi masa daluwarsa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian hukum.

